



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Jl. Dr. Soetomo No. 03 Telp. (0328) 662133
SUMENEP



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2020**

DAFTAR ISI LKJIP

		Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1. Gambaran Umum	1
	1.2. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	3
	1.3. Aspek Strategis Organisasi	5
	1.4. Permasalahan Utama Yang Dihadapi.....	8
BAB II	: PERENCANAAN KINERJA	9
	2.1. Rencana Stratejik	9
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA	15
	3.1. Capaian Kinerja Organisasi	16
	3.2. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan	18
	3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ...	22
	3.4. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	25
	3.5. Realisasi Anggaran	27
BAB IV	: PENUTUP	31
	4.1 Kesimpulan	31

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, atas Rahmad dan Hidayah Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep Tahun 2020 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini di susun berdasarkan surat Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep tanggal 29 Januari 2020 Nomor : 067/ 31 /435.032.3/2021 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020. Ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih kami sadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan guna perbaikan dimasa yang akan datang. Selanjutnya disampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Diharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan jalan dan jembatan pada tahun-tahun yang akan datang.

Sumenep, Januari 2021

**KEPALA DINAS PU. BINA MARGA
KABUPATEN SUMENEP**



Ir. ERI SUSANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680225 199403 1 007

EXECUTIVE SUMMARY (Ringkasan Eksekutif)

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Demikian juga, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 3 Bidang dalam kegiatan tahun 2020 mempunyai 1 (Satu) sasaran dengan 2 (Dua) Indikator, Dimana capaian kinerja rata-rata 152,12% untuk indikator pertama yaitu *Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik, Wilayah Daratan* tercapai 100,00% dan *Kepulauan* 104,23%. Untuk indikator kedua yaitu *Proporsi Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik* mempunyai capaian kinerja rata-rata 92,25% untuk *Wilayah Daratan* tercapai 108,96% dan *Wilayah Kepulauan* 162,99% .

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut di atas Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep mengalokasikan dalam APBD tahun 2020 berupa belanja tidak langsung (Belanja Pegawai) dan Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal) masing-masing sebesar Rp. 8.117.239.401 dan Rp. 116.349.277.474,00 Adapun realisasinya sampai dengan Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 6.591.403.605 atau sebesar 81,20% dan 101.016.222.922,78 atau 86,82%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan media informasi pertanggung jawaban Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep untuk mengukur tingkat keberhasilan atas kebijakan, program kerja dan kegiatan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep didalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana strategi Tahun Anggaran 2016. Harapan kami, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep Tahun 2021 dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses perubahansosial – ekonomi masyarakat menuju kearah yang lebih baik dalam kegiatan pembangunan, perubahan tentu tidak hanya diharapkan terjadi pada perubahan taraf hidup dan derajat partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan di wilayah, tetapi sentuhan aspek fisik prasarana bidang kebinamargaan yang merupakan faktor penentu dalam memfasilitasi terhadap keberhasilan pembangunan perlu mendapatkan perhatian.

Kondisi umum prasarana transportasi jalan maupun jembatan di Kabupaten Sumenep sampai saat ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama masalah kualitas dan kuantitas prasarana yang tersedia. Disamping itu, pengelolaan sumber daya baik pendanaan SDM dan teknologi yang efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan pelayanan jasa prasarana transportasi di seluruh Kabupaten Sumenep juga memiliki keterbatasan.

Pembangunan bidang prasarana transportasi semakin diperlukan perannya dalam rangka menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan serta dalam rangka menjamin mobilitas, kelancaran arus lalu-lintas barang dan jasa secara luas, tertib, aman, cepat dan efisien ke seluruh pelosok daerah selain itu pembangunan bidang prasarana transportasi juga merupakan salah satu unsur pokok dalam rangka merangsang pertumbuhan dan perkembangan bidang-bidang lainnya.

Menyadari akan pentingnya pengembangan prasarana jalan dan jembatan yang secara terus menerus dikembangkan dan diakselerasikan dengan perkembangan angkutan jalan raya, terutama keserasian antara beban dan kepadatan arus lalu-lintas dengan daya dukung jalan, jaringan pertumbuhan ekonomi dan jaringan pemasaran produksi demi peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, maka Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep yang memiliki tingkat urgensitas cukup tinggi terhadap penyediaan prasarana jalan dan

jembatan, harus eksis dengan dukungan aparatur yang senantiasa berpegang teguh pada disiplin kerja, sehingga diperoleh kinerja instansi Dinas PU. Bina Marga secara optimal.

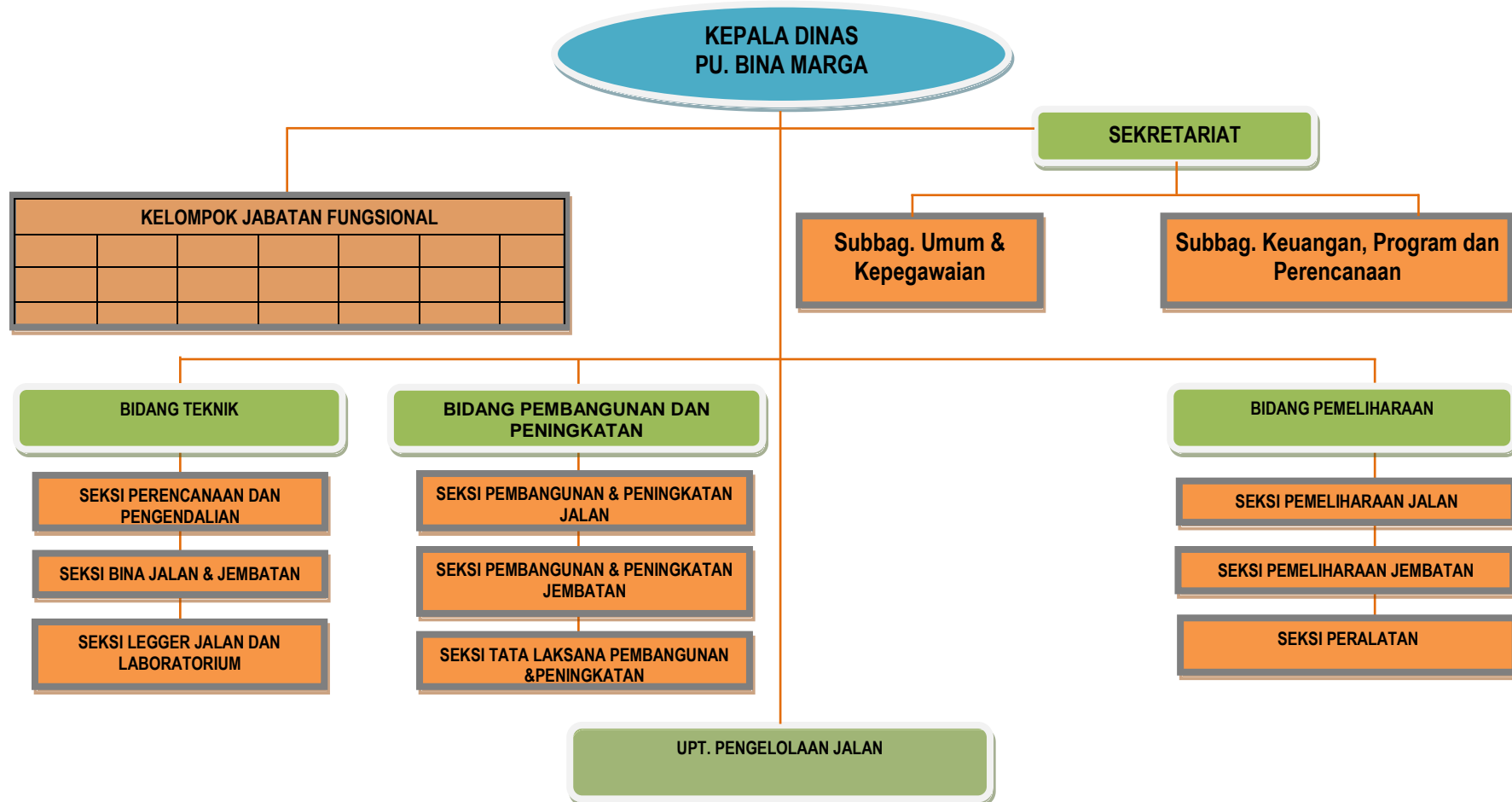
Dalam perkembangannya, Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara terus menerus telah berusaha sedapat mungkin untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan dalam rangka terciptanya **“GOOD GOVERNANCE”** melalui pelaksanaan fungsi pengawasan.

Berdasarkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bahwa Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep selaku pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Kebinamargaan di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sumenep. Secara struktural, Dinas PU. Bina Marga terdiri dari :

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Kepala Dinas | = 1 orang |
| 2. Sekretaris | = 1 orang |
| 3. Kepala Bidang | = 3 orang |
| 4. Kasubbag | = 2 orang |
| 5. Kasi | = 7 orang |
| 6. Kepala UPTD Pengelolaan Jalan | = 1 orang |
| 7. Pelaksana | = 59 orang |

1.2 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi



Gambar :Struktur Organisasi Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep

(Perbup No. 31 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas PU. Bina Marga)

Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2018 menetapkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang Pekerjaan Umum Bina Marga yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan dalam melaksanakan tugas seperti yang dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pekerjaan umum bina marga;
- b. Perumusan kebijakan teknis operasional pembangunan dan pengelolaan umum bina marga;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan petunjuk teknis pengendalian dan operasional yang mencakup perencanaan dan pemeliharaan laboratorium serta legger jalan;
- d. Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;.
- e. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. Pelaksanaan dan pengelolaan alat berat, dan pembangunan bina marga kecamatan;
- g. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi (tugas pembantuan) yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah di bidang pembangunan bina marga sesuai tugas dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mengakomodir harapan/tujuan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PU. Bina Marga, maka kebijakan umum Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep diarahkan pada peningkatan dan pengembangan serta pemeliharaan prasarana transportasi seperti jalan, jembatan serta fasilitas pendukung jalan lainnya melalui :

1. Kebijakan Bidang Teknik

- ❖ Peningkatan penataan ruang untuk mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan, mendukung keseimbangan pembangunan antar wilayah, meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman serta di kawasan perbatasan, daerah terisolir, daerah bencana dan rawan bencana.

2. Kebijakan Bidang Pembangunan

- ❖ Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kondisi jalan, jembatan, serta fasilitas pendukung jalan lainnya.

3. Kebijakan Bidang Pemeliharaan

- ❖ Peningkatan kondisi jalan untuk pengembangan wilayah dan penghubung dengan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi.

Kegiatan tersebut di atas merupakan fungsi utama disamping fungsi finansial, sebagai Dinas Penghasil dalam rangka peningkatan PAD sektorkebinamargaan yaitu Sewa alat-alat berat.

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan strategik merupakan rencana jangka panjang Dinas PU. Bina Marga yang dibuat secara bersama-sama antara Pimpinan dan seluruh Komponen Organisasi.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan yang merefleksi cita-cita yakni hendak menjadi apa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep di masa depan dan sekaligus menentukan arah perjalanan Instansi ini karena Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep merupakan Instansi pelaksana Otonomi Daerah di bidang Kebinamargaan, Dinas PU. Bina Marga mendukung visi Bupati Sumenep.

Guna mewujudkan eksistensi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep dalam lingkup yang terus menerus berkembang, perlu

kiranya dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkesinambungan. Perubahan tersebut disusun oleh suatu tahapan yang konsisten, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil secara maksimal.

Tahapan tersebut dimulai dengan perumusan visi yang jelas dan maupun menarik komitmen, menciptakan makna bagi kehidupan organisasi.

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah :

“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Mengacu pada Visi Bupati tersebut dan dokumen RPJPD Sumenep tahun 2010 – 2025 yang menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD 2016 – 2020 selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta *stakeholder* dalam proses pembangunan;
- 6) Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat;

Dari enam misi tersebut , yang menjadi kewenangan dan tupoksi Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep adalah terkait pada Misi kedua yaitu:

” Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang didukung Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Lingkungan yang Berkelanjutan”

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi Bupati Sumenep yang telah ditetapkan serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik, maka ditetapkan tujuan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep menetapkan tujuan yang hendak dicapai, antara lain :

- 1)Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas PU Bina MargaKabupaten Sumenep dalam kurun waktu 2016 – 2020
- 2)Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- 3)Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi
- 4)Memiliki orientasi ke masa depan
- 5)Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas PU Bina MargaKabupaten Sumenep dan juga *stake holders*
- 6)Menjamin kesinambungan kepemimpinan pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep.
- 7)Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut salah satu sasaran yang mendukung adalah sasaran pada urusan pekerjaan umum bina marga yaitu : “Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan/jembatan wilayah daratan dan kepulauan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan.”

1.4 PERMASAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Terkait upaya dalam pelaksanaan pencapaian kinerja terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Bererapa permasalahan utama yang menjadi permasalahan adalah :

1. Jumlah dan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas;
2. Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih kurang sistematis dan belum terkoordinir dengan baik;
3. Belum maksimalnya dukungan dana atau anggaran yang diberikan terutama dana untuk bagian perencanaan dan pengawasan suatu kegiatan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan di lapangan didukung pula dengan masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEJIK

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep adalah :

- ❖ Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan di wilayah daratan dan kepulauan.”

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas maka dilaksanakan kebijakan-kebijakan yaitu:

- a) Melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin dan berkala untuk wilayah daratan dan wilayah kepulauan.
- b) Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan jalan untuk wilayah daratan dan wilayah kepulauan dalam rangka pengembangan wilayah dan penghubung dengan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi.

Untuk mewujudkan Misi Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang didukung Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Lingkungan yang Berkelanjutan pada Tahun 2020, maka secara bertahap berkomitmen Bupati Sumenep bersama Kepala OPD melakukan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dimana merupakan tahun pertama yang telah ditetapkan guna mengetahui gambaran capaian indikator kinerja sasaran dalam 1 (satu) tahun yang di uraikan sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan / jembatan.	Proporsi infrastruktur dalam kondisi baik		Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan di wilayah daratan dan kepulauan	Proporsipanjang jalan dalam kondisi baik	
	Daratan :			Wilayah Daratan :	73,74%
	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	73,74%		Wilayah Kepulauan :	55,61%
	Proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik	89,66%			
	Kepulauan :			Proporsijumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	
	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	55,61%		Wilayah Daratan :	89,66%
	Proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik	84,21%		Wilayah Kepulauan :	84,21%

Perencanaan kinerja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep tahun 2020 dengan mendasarkan pada :

- ❖ Visi dan misi Bupati Sumenep yang telah ditetapkan
- ❖ Tugas pokok dan fungsi
- ❖ Program kerja

Adapun kegiatan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep yang telah direncanakan dalam rangka mewujudkan sasaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana rencana kinerja adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan jalan diwilayah Daratan dan Kepulauan.

SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan di wilayah daratan dan kepulauan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan masyarakat	1. Program Pembangunan Jalan	Jumlah panjang Jalan kabupaten yang dibangun di kabupaten Sumenep	40%	106.175.553.055,41
	Pembangunan Jalan - Daratan - kepulauan			
	Perencanaan Teknis pembangunan Jalan			
	Peningkatan Jalan DAK - Daratan - kepulauan			
	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan			
	Pembangunan Jalan , Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur Provinsi Jawa Timur			
Terlaksananya pemeliharaan jalan sebagai akses masyarakat dari dan atau menuju pusat kota adari daerah pertanian, tempat wisata dan pusat kegiatan lainnya di wilayah daratan dan kepulauan	2. Program Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan	Jumlah pemeliharaan dan perbaikan jalan yang rusak ringan dan sedang	25%	26.639.603.754,09
	Pemeliharaan Berkala Jalan			
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan			
	Perencanaan Teknik Pemeliharaan Berkala Jalan			
	Pemeliharaan Jalan Di Wilayah			

	Daratan (Pajak Rokok)			
	Pemeliharaan Jalan Di Wilayah Daratan (DBHCHT)			
Tersedianya dokumen tentang kondisi infrastruktur untuk mendukung kegiatan pembangunan jalan dan jembatan	3. Program Inspeksi Kondisi Jalan	Jumlah dokumen tentang data kondisi jalan yang akan ditangani	25%	321.312.300,00
	Survey Kelayakan Penanganan Jalan dan Jembatan			
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jembatan di wilayah daratan dan kepulauan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan masyarakat	1. Program Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan kabupaten yang dibangun di kabupaten Sumenep	40%	4.002.154.900,00
	Pembangunan Jembatan			
Terlaksananya pemeliharaan jembatan sebagai akses masyarakat dari dan atau menuju pusat kota adari daerah pertanian, tempat wisata dan pusat kegiatan lainnya di wilayah daratan dan kepulauan	2. Program Rehabilitasi / pemeliharaan Jembatan	Jumlah pemeliharaan dan perbaikan jembatan yang rusak ringan dan sedang	25%	906.700.000,00
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Wilayah Daratan			
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Wilayah Kepulauan			

Meningkatnya infrastruktur jembatan yang menjangkau wilayah daratan dan wilayah kepulauan yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas	Program Tanggap Darurat Jembatan			
	Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat	Penanganan infrastruktur jembatan yang rusak karena bencana		163.255.500,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/Badan Hukum/Pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Atas dasar tersebut, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup Akuntabilitasnya masing-masing karena Akuntabilitas yang diminuti meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi yang bersangkutan.

Dalam sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, sehingga di dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. Harus jujur, obyektif dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen Instansi Pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik penyaluran kinerja dan penyusunan laporan kinerja.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Pada Bab III ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Sumenep berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Sumenep telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016–2020. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Kabupaten Sumenep yang terdiri dari satu sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jaringan Jalan di wilayah Daratan dan Kepulauan dan Dua indikator kinerja (*out comes*) yaitu pertama Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Wilayah Daratan dan Kepulauan, Kedua Proporsi Panjang Jembatan dalam kondisi baik untuk wilayah Daratan dan Kepulauan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2020	REALISASI TH. 2020	% CAPAIAN TH. 2020
1.1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan di wilayah daratan dan kepulauan	Proporsipanjang jaringan jalan dalam kondisi baik ~ Wilayah Daratan ~Wilayah Kepulauan	73,74 % 55,61 %	73,74% 57,96%	100,00% 104,23%
1.2		Proporsi Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik ~ Wilayah Daratan ~ Wilayah Kepulauan	89,66 % 84,21 %	97,69% 91,00%	108,96% 108,06%

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja , Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun 2019 Dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TH. 2020	REALISASI KINERJA	
				Th. 2019	Th. 2020
1.1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan di wilayah daratan dan kepulauan	Proporsipanjang jaringan jalan dalam kondisi baik ~ Wilayah Daratan ~Wilayah Kepulauan	73,74 % 55,61 %	72,00% 56,65%	73,74% 57,96%
1.2		Proporsi Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik ~ Wilayah Daratan ~ Wilayah Kepulauan	89,66 % 84,21 %	76,17% 82,35%	97,69% 91,00%

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET AKHIR TAHUN 2020	REALISASI AKUMULASI s/d. TAHUN 2020	% CAPAIAN
1	2		3	4	5
Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan di wilayah daratan dan kepulauan	1.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Wilayah Daratan	74,78	73,74	101,41
		Wilayah Kepulauan	56,15	57,96	96,87
	1.2 Proporsi Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik	Wilayah Daratan	90,87	97,69	93,01
		Wilayah Kepulauan	85,37	91,00	93,81

3.2 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Untuk mengukur sejauhmana sebuah instansi mengalami peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan maka diperlukan kajian-kajian atau analisis sebagai berikut:

1. Indikator *Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan*

Untuk indikator pertama yaitu Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan memiliki target 73,74% sedangkan realisasinya adalah 37,74% dan Panjang Jalan dalam kondisi Baik wilayah kepulauan memiliki target 55,61% sedangkan realisasinya 57,96% hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja relatif baik karena realisasinya melampaui dari target yang telah ditentukan dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Berhasil**.

Untuk angka realisasi Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan sehingga memperoleh angka sebesar 73,74%

merupakan hasil dari perbandingan panjang jalan dalam kondisi baik diwilayah daratan 821.702 km di bagi dengan jumlah keseluruhan jalan di wilayah daratan sepanjang 1.125.539 km.

Sedangkan angka realisasi Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi Baik Wilayah Kepulauan sehingga memperoleh angka sebesar 57,96% yaitu hal ini merupakan hasil dari perbandingan antara panjang jalan dalam kondisi baik diwilayah kepulauan 236.163 km di bagi dengan jumlah keseluruhan jalan di wilayah kepulauan sepanjang 416,821 km.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 maka realisasi 2020 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan terealisasi 72,00% dan untuk Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi Baik wilayah kepulauan terealisasi 56,65%.

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik wilayah daratan dengan target pada akhir masa RPJMD sebesar 74.78% dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 101,41%. Untuk wilayah kepulauan dengan target pada akhir masa RPJMD 56,15% dengan capaian kinerja 96,87%.

Indikator Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik wilayah daratan ini dapat di kategorikan berhasil dikarenakan adanya dukungan dari Kegiatan Pembangunan Jalan di wilayah daratan, Kegiatan Pembangunan Jalan di wilayah daratan DAK. dan Kegiatan Pemeliharaan Jalan di wilayah daratan.

Indikator Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik wilayah kepulauan juga dapat di kategorikan berhasil dikarenakan adanya dukungan dari Kegiatan Pembangunan Jalan di wilayah kepulauan dan Kegiatan Pemeliharaan Jalan di wilayah kepulauan.

2. Indikator ***Proporsi Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan***

Untuk indikator kedua yaitu Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan memiliki target 89,66% sedangkan realisasinya

97,69% dan untuk Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik Wilayah Kepulauan targetnya adalah 84,21% dan realisasinya 91,00% hal ini juga menunjukkan sebuah hasil kinerja yang baik karena realisasinya melampaui dari target yang telah ditentukan dan indikator ini termasuk **Berhasil**.

Untuk angka realisasi Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan sehingga memperoleh angka sebesar 97,69% yaitu hal ini merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah jembatan dalam kondisi baik diwilayah daratan 211 buah di bagi dengan jumlah keseluruhan jumlah jembatan di wilayah daratan sebanyak 214 buah.

Sedangkan untuk angka realisasi Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik Wilayah Kepulauan sehingga memperoleh angka sebesar 91,00% yaitu hal ini merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah jembatan dalam kondisi baik diwilayah kepulauan 28 buah dibagi dengan jumlah keseluruhan jumlah jembatan di wilayah kepulauan sebanyak 34 buah.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 maka realisasi 2020 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan terealisasi 97,69% dan untuk Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik wilayah kepulauan terealisasi 91,00%.

Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi baik wilayah daratan dengan target pada akhir masa RPJMD sebesar 90,87% Dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 93,01%. Untuk wilayah kepulauan dengan target pada akhir masa RPJMD 85,37% dengan capaian kinerja 93,81%.

Indikator ini berhasil dikarenakan pada dasarnya jembatan-jembatan yang ada baik didaratan maupun kepulauan kondisinya masih baik.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran yang sudah ditetapkan antara lain :

1. Perencanaan kegiatan yang belum seluruhnya sistematis dan terkoordinir;
2. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang belum sepenuhnya memadai;
3. Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang belum lengkap;
4. Kualitas aparatur pemerintah yang belum seluruhnya berkualitas;
5. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan atau kegiatan lainnya yang belum didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
6. Koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana dengan baik.
7. Pelaksanaan pekerjaan yang baru di mulai pada pertengahan tahun 2019 karena kendala penerapan aturan baru terkait pengadaan barang dan jasa sehingga banyak kegiatan yang baru selesai di akhir tahun

Guna mengatasi keterbatasan/kendala tersebut di atas diperlukan upaya penanggulangan sebagai berikut :

1. Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis dan terkoordinir;
2. Sangat diperlukan adanya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
3. Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan lengkap;
4. Sangat diperlukan peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui Diklat, Studi Banding, Tugas Belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggung jawab);
5. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan

dan pemeliharaan pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;

6. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.
7. Perlu percepatan pada proses pelaksanaan pekerjaan dan administrasi kegiatan sehingga kegiatan dapat selesai dan dipertanggung jawabkan pada akhir tahun 2020

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan Program dan Kegiatan Kebinamargaan pada Tahun 2020 adalah terjadinya wabah Corona Virus 19 (Covid 19) di Indonesia termasuk di Kabupaten Sumenep, yang harus diantisipasi dengan penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah untuk Penanggulangannya, maka berdampak pada efisiensi Anggaran yang harus dilakukan pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep, dimana terjadi pengurangan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 11 Milyar. Sehingga ada beberapa kegiatan yang harus dibatalkan pelaksanaannya.

Solusi terkait dengan munculnya permasalahan tersebut maka dilakukanlah pengkajian secara komprehensif oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep dengan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Kabupaten Sumenep untuk menyusun ulang prioritas atas kegiatan-kegiatan yang ada, kemudian kegiatan yang dianggap sangat penting tetap dipertahankan untuk dilaksanakan. Sedangkan kegiatan yang dapat ditunda atau dibatalkan maka dihapus dari kegiatan tahun anggaran 2020.

3.3 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam mengukur analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya dilakukan evaluasi dalam bentuk tabel sebagai berikut:

a. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Atas Realisasi Kinerja Sasaran Renstra

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALIASI	CAPAIAN KINERJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN ANGGARAN	
1.1. Program Pembangunan Jalan								
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan di wilayah daratan dan kepulauan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan masyarakat	Jumlah panjang jalandalam kondisi baik di Kabupaten Sumenep	1.189,10 km	105,5 km	8,87%	132.815.156.809,50	127.331.140.060,80	95,87%	- 87,00%
2.1. Program Rehabilitasi / pemeliharaan Jembatan								
2. Terlaksananya pemeliharaan jembatan sebagai akses masyarakat dari atau menuju pusat kota dari daerah pertanian, tempat wisata dan pusat kegiatan lainnya di wilayah daratan dan wilayah kepulauan.	Jumlah Jembatan dalam kondisi baik di kabupaten sumenep	10 buah	5 buah	50 %	4.908.854.900,00	4.776.056.855,00	97,29%	- 47,29%
3.1. Program Inspeksi Kondisi Jalan								
3. Tersedianya dokumen tentang kondisi infrastruktur untuk mendukung kegiatan pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah dokumen tentang data kondisi jalan yang akan ditangani	2 dokumen	2 dokumen	100%	321.312.300,00	289.060.000,00	89,96%	10,04%

Sedangkan untuk Pencapaian Kinerja dan Anggaran Bahwa untuk indikator Proporsi Jumlah Jalan dalam kondisi baik untuk pencapaian kinerjanya memiliki target 1.189,10 km sedangkan realisasinya 105,5 km sehingga dengan demikian capaian kinerjanya 8,87%. Sedangkan untuk pencapaian anggarannya

dengan pagu anggaran Rp.132.815.156.809.50 dengan realisasi Rp. 127.331.140.060.80 sehingga dengan demikian capaian anggarannya 95,87%.

Bahwa untuk indikator Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi baik untuk pencapaian kinerjanya memiliki target 10 buah sedangkan realisasinya 5 buah sehingga dengan demikian capaian kinerjanya 50 %. Sedangkan untuk pencapaian anggarannya dengan pagu anggaran Rp. 4.908.854.900.,00 dengan realisasi Rp. 4.776.056.855.,00 sehingga dengan demikian capaian anggarannya 97,29%.

Sedangkan untuk jumlah dokumen tentang data kondisi jalan yang akan ditangani untuk pencapaian kinerjanya memiliki target 2 dokumen sedangkan realisasinya 2 dokumen sehingga dengan demikian capaian kinerjanya 100%. Sedangkan untuk pencapaian anggarannya dengan pagu anggaran Rp. 321.312.300.00 dengan realisasi Rp. 289.060.000.00 sehingga dengan demikian capaian anggarannya 89,96%.

Kemudian untuk Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk indikator Proporsi jumlah Jalan dalam kondisi baik dengan capaian kinerja 8,87% dengan anggaran terserap sebesar 95,87% sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensinya mencapai - 87,00%.

Untuk indikator Proporsi jumlah Jembatan dalam kondisi baik dengan capaian kinerja 50% dengan anggaran terserap sebesar 97,29% sehingga dapat disimpulkan tingkat efisiensinya mencapai - 47,29%.

Kemudian untuk jumlah Dokumen tentang data kondisi jalan yang akan ditangani dengan capaian kinerja 100% dengan anggaran terserap sebesar 89,96% sehingga dapat disimpulkan tingkat efisiensinya mencapai 10,04%.

3.4 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan Indikator ini dapat berhasil dikarenakan didukung oleh

➤ **Program Pembangunan Jalan dan Jembatan** dengan didukung kegiatan pertama yaitu Pembangunan Jalan dengan output jumlah jalan yang ditingkatkan, dimana kegiatan yang sifatnya strategis dilaksanakan di 15 (lima belas) lokasi yang terdapat di wilayah **daratan** sedangkan di wilayah **kepulauan** terdapat 9 lokasi. 9 lokasi di kecamatan Arjasa, 4 lokasi di kecamatan kangayan, 4 lokasi di kecamatan sapekan, 2 lokasi di kecamatan nonggunong, 6 lokasi di kecamatan gayam, 6 lokasi di kecamatan masalembu, 4 lokasi di kecamatan Talango, 8 lokasi di kecamatan Ra'as dan 3 lokasi di kecamatan Giligenting

Kedua adalah Peningkatan jalan DAK dengan output jumlah jalan poros kabupaten yang di tingkatkan dimana kegiatan yang sifatnya strategis dilaksanakan di 8 lokasi di wilayah **daratan** yaitu 2 lokasi di kecamatan kalianget, 1 lokasi di kecamatan batu putih, 2 lokasi di kecamatan guluk-guluk, 1 lokasi di kecamatan saronggi, satu lokasi di kecamatan rubaru, 1 lokasi di kecamatan lenteng dan 1 lokasi di kecamatan manding. Untuk wilayah **kepulauan** 1 lokasi yaitu di kecamatan talango.

Ketiga adalah kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan output jumlah jalan dan jembatan strategis yang direncanakan untuk sepuluh paket kegiatan.

- **Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan** dengan kegiatan pertama adalah Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dengan output jumlah jalan yang terpelihara sebagaimana terdapat di 11 (sebelas) paket strategis di wilayah kepulauan.

Kedua kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dengan output jumlah jalan yang terpeliharadan untuk kegiatan ini lokasi kegiatannya juga tersebar diberbagai lokasi baik di wilayah daratan dan juga kepulauan (27 kecamatan di kabupaten Sumenep daratan dan kepulauan).

- **Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan** dengan kegiatan Survey Kelayakan Penanganan Jalan dan Jembatan dengan output survey kelayakan rencana penanganan jalan/jembatan. Untuk kegiatan ini lokasi kegiatannya juga tersebar diberbagai lokasi baik di wilayah daratan dan juga kepulauan (27 kecamatan di kabupaten sumenep daratan dan kepulauan).

2. Indikator Proporsi Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan Indikator ini sangat berhasil dikarenakan didukung oleh

- **Program Pembangunan Jalan dan Jembatan** yaitu kegiatan Pembangunan Jembatan dengan output jumlah jembatan yang dibangun /diperbaiki dan untuk wilayah **daratan** kegiatan ini dilaksanakan di 9 lokasi. Sedangkan di wilayah **kepulauan** terdapat 6 lokasi.
- **Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan** yaitu kegiatan Pemeliharaan Jembatan dengan output jumlah jembatan yang terpelihara dan untuk kegiatan ini lokasi kegiatannya juga tersebar diberbagai lokasi baik di wilayah daratan dan juga kepulauan (27 kecamatan di kabupaten sumenep daratan dan kepulauan).

3.5 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung realisasi kinerja dari 2 indikator tersebut, Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep Menganggarkan Program Pembangunan Jalan sebesar Rp. 106.175.553.055,41 dan terealisasi sebesar Rp. 101.196.281.177,55 atau 95,31%. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan sebesar Rp. 26.639.603.754,09 terealisasi sebesar Rp. 26.134.858.883,25 atau 98,10% serta Program Inspeksi Kondisi Jalan sebesar Rp. 321.312.300 terealisasi sebesar Rp. 289.060.000,00 atau 89,96%. untuk mendukung Indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Indikator Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik di dukung oleh Program Pembangunan Jembatan sebesar Rp. 4.002.154.900,00 terealisasi sebesar Rp. 3.894.709.550,00 atau 97,31% kemudian Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan sebesar Rp. 906.700.000,00 terealisasi sebesar Rp. 881.347.305,00 atau 97,20%.

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
BELANJA LANGSUNG	116.349.277.474,00	101.016.222.922,78	86,82%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
- Penyediaan jasa surat menyurat	2.900.500,00	2.103.500,00	72,52%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	200.000.000,00	138.979.245,00	69,48%
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	259.973.000,00	244.068.600,00	93,88%
- Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	11.003.270,30	9.981.500,00	90,71%
- Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	49.095.000,00	39.134.000,00	79,71%
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	788.038.000,00	782.444.420,00	99,29%
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	136.784.000,00	113.640.715,00	83,08%
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor -	18.000.000,00	10.920.100,00	60,66%
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	58.190.000,00	32.275.000,00	55,46%
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	75.000.000,00	66.697.819,00	88,93%
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	11.250.000,00	10.900.400,00	96,89%
- Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	225.899.250,00	214.354.600,00	94,88%
- Peringatan Hari-Hari Besar	105.425.000,00	90.112.200,00	85,47%
- Operasional UPTD	348.999.500,00	334.107.200,00	95,73%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal			
Pendidikan dan pelatihan formal	0	0	
- Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	50.760.000,00	48.620.000,00	95,78%

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.165.000,00	14.448.500,00	71,65%
- Penyusunan Laporan Keuangan	5.500.000,00	4.007.000,00	72,85%
<i>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</i>	3.000.000,00	1.949.000,00	
<i>Penyusunan Laporan Keuangan semesteran</i>	2.500.000,00	2.058.000,00	
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.665.000,00	10.441.500,00	71,20%
<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4.665.000,00	4.665.000,00	
<i>Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i>	2.500.000,00	2.360.000,00	
<i>Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD</i>	7.500.000,00	3.416.500,00	
Program Pembangunan Jalan	106.175.553.055,41	101.196.281.177,55	95,31%
- Pembangunan / Peningkatan Jalan di Wilayah Daratan:	54.783.750.464,10	52.335.772.214,10	95,53%
- Pembangunan / Peningkatan Jalan di Wilayah Kepulauan:	21.969.062.097,25	21.290.469.997,25	96,91%
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	1.278.209.000,00	1.278.209.000,00	100%
- Peningkatan Jalan DAK di Wilayah Daratan	25.581.625.853,70	23.804.532.139,69	93,05%
- Peningkatan Jalan DAK di Wilayah Kepulauan	984.324.911,25	917.279.597,40	93,18%
- Pembangunan Jalan, Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur Provinsi Jawa Timur	1.578.580.729,11	1.570.018.229,11	99,45%
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	26.639.603.754,09	26.134.858.883,25	98,10%
- Pemeliharaan Berkala Jalan di Wilayah Daratan	7.717.110.867,80	7.577.002.016,80	98,18%
- Pemeliharaan Berkala Jalan di Wilayah Kepulauan	13.462.216.199,85	13.325.621.620,01	98,98%
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Wilayah Daratan	3.382.431.850,00	3.313.521.610,00	97,96%
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kepulauan	156.850.000,00	154.751.600,00	98,66%

Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep

- Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	631.950.302,00	631.950.302,00	100%
- Pemeliharaan Berkala Jalan Di Wilayah Daratan (Pajak Rokok)	157.032.800,0	00,0	00,0%
- Pemeliharaan Berkala Jalan Di Wilayah Daratan (DBHCHT)	1.132.011.734,44	1.132.011.734,44	100%
Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan	00,0	00,0	
- Pembuatan Sistem Informasi Jaringan Jalan Kabupaten	0	0	0%
- Pemantauan/Pemutahiran Kondisi Jalan dan Jembatan	126.240.000,00	108.484.000,00	85,93%
Program Inspeksi Kondisi Jalan	321.312.300,00	289.060.000,00	89,96%
- Survey Kelayakan Penanganan Jalan	321.312.300,00	289.060.000,00	89,96%
Program Tanggap Darurat Jalan	152.500.000,00	132.297.000,00	86,75%
- Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat	152.500.000,00	132.297.000,00	86,75%
Program Pembangunan Jembatan	4.002.154.900,00	3.894.709.550,00	97,31%
- Pembangunan Jembatan di Wilayah Daratan	4.002.154.900,00	3.894.709.550,00	97,31%
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	906.700.000,00	881.347.305,00	97,20%
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan di Wilayah Daratan	783.554.000,00	779.493.655,00	99,48%
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan di Wilayah Kepulauan	123.146.000,00	101.853.650,00	82,70%
Program Tanggap Darurat Jembatan	163.255.500,00	159.004.500,00	97,39%
- Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat	163.255.500,00	159.004.500,00	97,39%

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Demikian juga, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 3 Bidang dalam kegiatan tahun 2020 mempunyai 1 (Satu) sasaran dengan 2 (Dua) Indikator, Dimana capaian kinerja rata-rata 152,12% untuk indikator pertama yaitu *Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik, Wilayah Daratan* tercapai 100,00% dan *Kepulauan* 104,23%. Untuk indikator kedua yaitu *Proporsi Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik* mempunyai capaian kinerja rata-rata 92,25% untuk *Wilayah Daratan* tercapai 108,96% dan *Wilayah Kepulauan* 162,99% .

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut di atas Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep mengalokasikan dalam APBD tahun 2020 berupa belanja tidak langsung (Belanja Pegawai) dan Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal) masing-masing sebesar Rp. 8.117.239.401 dan Rp. 116.349.277.474,00 Adapun realisasinya sampai dengan Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 6.591.403.605 atau sebesar 81,20% dan 101.016.222.922,78 atau 86,82%.

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan Program dan Kegiatan Kebinamargaan pada Tahun 2020 adalah terjadinya wabah Corona Virus 19 (Covid 19) di Indonesia termasuk di Kabupaten Sumenep, yang harus diantisipasi dengan penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah untuk Penanggulangannya, maka berdampak pada efisiensi Anggaran yang harus dilakukan padasemua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep, dimana terjadi pengurangan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.

11 Milyar. Sehingga ada beberapa kegiatan yang harus dibatalkan pelaksanaannya.

Solusi terkait dengan munculnya permasalahan tersebut maka dilakukanlah pengkajian secara komprehensif oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep dengan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Kabupaten Sumenep untuk menyusun ulang prioritas atas kegiatan-kegiatan yang ada, kemudian kegiatan yang dianggap sangat penting tetap dipertahankan untuk dilaksanakan. Sedangkan kegiatan yang dapat ditunda atau dibatalkan maka dihapus dari kegiatan tahun anggaran 2020.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran yang sudah ditetapkan antara lain :

1. Perencanaan kegiatan yang belum seluruhnya sistematis dan terkoordinir;
2. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang belum sepenuhnya memadai;
3. Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang belum lengkap;
4. Kualitas aparatur pemerintah yang belum seluruhnya berkualitas;
5. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan atau kegiatan lainnya yang belum didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
6. Koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana dengan baik.
7. Pelaksanaan pekerjaan yang baru di mulai pada pertengahan tahun 2020 karena kendala penerapan aturan baru terkait pengadaan barang dan jasa sehingga banyak kegiatan yang baru selesai di akhir tahun

Guna mengatasi keterbatasan/kendala tersebut di atas diperlukan upaya penanggulangan sebagai berikut :

8. Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis dan terkoordinir;

9. Sangat diperlukan adanya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
10. Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan lengkap;
11. Sangat diperlukan peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui Diklat, Studi Banding, Tugas Belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggung jawab);
12. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang di dukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
13. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.
14. Perlu percepatan pada proses pelaksanaan pekerjaan dan administrasi kegiatan sehingga kegiatan dapat selesai dan dipertanggung jawabkan pada akhir tahun 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan media informasi pertanggung jawaban Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep untuk mengukur tingkat keberhasilan atas kebijakan, program kerja dan kegiatan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep didalam mencapai visi dan misi Bupati Sumenep yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi Tahun Anggaran 2020. Harapan kami, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep Tahun 2020 dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.